

IMPLEMENTASI SUPERVISI PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH

Imam Turmidzi

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang
imamturmidzi@stai-binamadani.ac.id

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang implementasi supervisi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam peran supervisi pendidikan tidak boleh diabaikan. Sebab supervisi merupakan hal yang signifikan dalam mewujudkan mutu tersebut. Supervisor (pengawas, kepala sekolah/madrasah) harus mempunyai kepiawaian dan keseriusan dalam mensupervisi lembaga pendidikan Islam dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Islam.

Kata Kunci: Supervisi; Mutu Pendidikan; Madrasah

Pendahuluan

Supervisi/pengawasan dalam lembaga pendidikan berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, apalagi jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di Negara lain. Dari data United Nations Development Programme (UNDP) bahwa *Human Development Indeks* (HDI) tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat 107 dari 189 Negara. Pada peringkat ini, nilai HDI yang dicatatkan adalah 0,718; dengan tingkat harapan hidup 71,7; jumlah tahun pendidikan yang diharapkan 13,6; rata-rata tahun pendidikan yang ditempuh 8,2; dan pendapatan per kapita 11.459. Meskipun oleh UNDP Indonesia baru saja dikelompokkan menjadi negara dengan HDI tinggi; walaupun tidak ada peningkatan dalam ranking; tetap saja kondisi ini patut menjadi perhatian kita, karena kita masih tertinggal dengan beberapa negara sahabat.

Indonesia menduduki urutan ke-107 dari 189 Negara, peringkat ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada dalam urutan ke-124

dari 178 negara (HDI 2013).¹ Meskipun peringkat ini naik tiga tingkatan, Indonesia masih dalam kelompok lemah dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Pada sisi lain, krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia, tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan, namun juga telah merambah pada bidang mental spiritual, yakni merosotnya akhlak dan budi pekerti pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini menuntut semua pihak untuk berpikir cerdas dan serius dalam hal bagaimana meningkatkan moralitas bangsa dan mengembalikan citra bangsa Indonesia, khususnya pada generasi muda dan anak-anak Indonesia sebagai aset yang sangat fundamental dalam setiap aktivitas pemberdayaan manusia sebagaimana yang menjadi hakikat dan tujuan pendidikan itu sendiri.

Atas dasar berbagai keprihatinan terhadap kondisi dunia pendidikan kita, utamanya terhadap supervisi, pengelolaan pendidikan yang sebagian besar masih konvensional sangat mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu lembaga pendidikan menghasilkan *pebelajar dengan hasil belajar yang baik, hasil belajar yang biasa* dan *hasil belajar tergolong kurang baik*. Kalau kita telaah keberadaan lembaga pendidikan di Indonesia baik dibawah Dinas Pendidikan maupun Mapenda Kemenag mengalami penurunan mutu disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah: *pertama* supervisi pendidikan tidak dilaksanakan secara profesional, terkendala pemahaman dan pelaksanaan supervisi yang masih kaku dan sebatas formalitas, yaitu masih ada jarak antara supervisor dengan guru. *Kedua*, belum optimalnya kegiatan pembelajaran karena terkendala keterbatasan sarana dan prasarana terutama di lembaga pendidikan yang terletak di daerah, khususnya daerah terpencil. *Ketiga*, Keberadaan data nasional yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional, tidak sepenuhnya di dapat melalui proses ujian nasional yang penuh kejujuran. Hasilnya, walaupun secara kuantitatif menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada kenaikan nilai hasil pembelajaran, namun secara kualitatif, proses pelaksanaannya banyak dijumpai praktik-praktik kecurangan sehingga banyak menimbulkan keprihatinan bagi para insan pendidikan kita. *Keempat*, sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak birokrat dibidang pendidikan yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejak era Orde Baru sampai era reformasi berjalan lebih satu dasawarsa, fenomena ini masih saja selalu dalam bentuk yang serupa tetapi tidak sama,² bahkan sudah mendarah daging dan

¹ <http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking>

(diakses pada 20 Januari 2020)

²Moh. Makin Baharuddin, *Manajemen Pendidikan Islam Transformasi Menuju Sekolah/Madrasah Unggul*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 3

susah untuk diberantas. Inilah kondisi yang memprihatinkan dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, sudah saatnya kita sebagai pemikir dan praktisi pendidikan bekerja keras untuk merubah kondisi yang demikian menjadi kondisi yang lebih baik.

Berangkat dari fenomena dan kenyataan diatas, sudah seharusnya kita sebagai praktisi pendidikan, berjuang keras memerangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan kita. Kita harus melakukan terobosan baru diantaranya melakukan supervisi yang profesional dalam lembaga pendidikan agar mutu pendidikan dapat kita raih sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dari sinilah, maka penulis tertarik menulis dengan tema "Peran Supervisi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam."

Hasil dan Pembahasan

1. Supervisi Pendidikan

Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris "*supervision*" yang terdiri dari dua kata "*super*" dan "*vision*". *Super* berarti atas atau lebih, sedangkan *vision* berarti melihat atau meninjau. Oleh karena itu, secara etimologi supervisi adalah melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan.³

Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.⁴

Terdapat beberapa istilah yang hampir sama dengan supervisi, bahkan dalam pelaksanaannya istilah-istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Istilah-istilah tersebut, antara lain, pengawasan, pemeriksaan, dan inspeksi. Pengawasan mengandung arti suatu kegiatan untuk melakukan pengamatan agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan dimaksudkan untuk melihat bagaimana kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan. Inspeksi dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki dalam suatu pekerjaan. Oleh karena itu, deskripsi istilah-istilah diatas identik dengan supervisi sehingga wajar kalau dalam penggunaannya sering dipertukarkan.

Kalau kita telaah, dalam pemakaiannya secara umum supervisi diberi arti sama dengan direktur, dan manajer. Dalam bahasa umum ini ada

³ E. Mulyasa, E, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 239

⁴ M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Cet. xix, (Bandung: Rosdakarya, 2009), h. 76

kecondongan untuk membatasi pemakaian istilah supervision pada orang-orang yang berada dalam kedudukan yang lebih bawah dalam hirarki manajemen. Istilah-istilah umum bagi kedudukan ini selain dari supervisor adalah *foremen* dan *supertendent*, yang dinegara kita disebut "mandor" pengawas, "opsinef, dan "peter". Merekalah yang bertanggung jawab secara langsung dan bertatap muka tentang kegiatan-kegiatan dari hari ke hari sekelompok pegawai bawahan. Fungsi-fungsi mereka meliputi penugasan dan pembagian pekerjaan, pemeriksaan efisiensi dari proses, metode dan tehnik yang digunakan, pengadaan alat perlengkapan yang diperlukan. Seorang supervisor juga sering diberi kekuasaan untuk mengangkat, memberhentikan atau memindahkan pekerja, dan untuk melakukan tindakan-tindakan⁵ lain selaku seorang manajer.

Kemudian, konsep supervisi modern dirumuskan oleh Kimball Wiles (1967) sebagai berikut: "*Supervision is assistance in the devolepment of a better teaching learning situation*". *Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik*. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar mengajar (*goal, material, technique, method, teacher, student, an envirovment*). Situasi belajar inilah yang seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan melalui layanan kegiatan supervisi. Dengan demikian layanan supervisi tersebut mencakup seluruh aspek dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.

Konsep supervisi tidak bisa disamakan dengan inspeksi, inspeksi lebih menekankan kepada kekuasaan dan bersifat otoriter, sedangkan supervisi lebih menekankan kepada persahabatan yang dilandasi oleh pemberian pelayanan dan kerjasama yang lebih baik diantara guru-guru, karena bersifat demokratis.

Dengan demikian, supervisi ditujukan kepada penciptaan atau pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Untuk itu ada dua hal (aspek) yang perlu diperhatikan. Pertama, Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yang kedua, Hal-hal yang menunjang kegiatan belajar mengajar

Karena aspek utama adalah guru, maka layanan dan aktivitas kesupervisian harus lebih diarahkan kepada upaya memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Untuk itu guru harus memiliki yakni: 1) kemampuan personal, 2) kemampuan profesional 3) kemampuan sosial.⁵

Berangkat dari uraian diatas dapat ditarik benang merah, yang dimaksud dengan supervisi pendidikan adalah bimbingan profesional bagi guru-guru.

5 Depdiknas, *Petunjuk Pengelolaan Adminstrasi Sekolah Dasar*,(Jakarta: Depdiknas,1997), h. 47

Bimbingan profesional yang dimaksudkan adalah segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional, sehingga mereka lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar siswa.

2. Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu

Menurut Juran dalam Hadis dan Nurhayati⁶ mutu produk adalah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan pengguna produk tersebut didasarkan atas lima ciri utama, yaitu (1) teknologi yaitu kekuatan, (2) psikologis, yaitu, citra, rasa atau status, (3) waktu, yaitu kehandalan, (4) kontraktual, yaitu ada jaminan, (5) etika, yaitu sopan santun.

Menurut Crosby⁷ mutu adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.

Menurut Deming⁸ mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu adalah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan setia dalam membeli produk perusahaan tersebut baik berupa barang maupun jasa.

Menurut Feigenbaum⁹ mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Suatu produk dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Dari beberapa pendapat pakar mutu diatas dapat diambil benang merah, bahwa pengertian mutu pendidikan dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses,

⁶ Abdul Hadis, Nurhayati, *Manajemen*, h. 84

⁷ P.B. Crosby, *Quality in Free*, (New York: McGraw Hill Book Inc, 1979), h. 58

⁸ W.E. Deming, *Out of Crisis*, (Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1982), h. 176

⁹ Feigenbaum, *Total Quality Control*, (New York: McGraw Hill Book Inc, 1986), h.

dan out put pendidikan.¹⁰ Mengenai input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah/madrasah, guru/ustadz termasuk guru BP, karyawan, dan siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan sebagainya). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah/madrasah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, dan program. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah/madrasah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.

Selanjutnya adalah proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah/madrasah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya.

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru/ustadz, siswa/santri, kurikulum, uang, peralatan, dan sebagainya) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik/santri tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya atau ustadznya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik/santri, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang penting lagi peserta didik/santri tersebut mampu belajar cara belajar (mampu mengembangkan dirinya).

Kemudian berikutnya output Pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah/ madrasah. Kinerja sekolah/madrasah adalah prestasi

¹⁰ Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Buku 1). (Jakarta: Depdikna, 2001), h. 5

sekolah/madrasah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah/madrasah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah/madrasah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah/madrasah dikatakan berkualitas atau bermutu tinggi jika prestasi sekolah/madrasah, khususnya prestasi siswa/santri, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) prestasi akademik berupa ulangan umum, nilai ujian akhir, karya ilmiah, lomba-lomba akademik; dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, ketrampilan, , dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah/madrasah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya supervisi, perencanaan, pelaksanaan.¹¹

Dari uraian di atas dapat dipertegas, bahwa supervisi termasuk bagian terpenting yang berperan dalam peningkatan mutu pendidikan Islam, karena bersentuhan langsung dengan kondisi dilapangan baik yang berhubungan dengan input, proses maupun output pendidikan.

b. Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Supervisi

Peran supervisi adalah keikutsertaan atau kiprah seseorang dalam suatu hal (menyangkut potensi yang dimiliki), kaitannya dalam hal ini adalah peran supervisor adalah orang yang memiliki profesi atau pembinaan dalam bimbingan terhadap perbaikan mutu pendidikan. Pembinaan tersebut diberikan kepada seluruh staf sekolah/madrasah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik.

Peran menurut Getzels (1967), "*That roles are defined in terms of role expectations-the normative rights and duties that define within limits what a person should or should not do under various circumstances while he is the incumbent a particular role within an institution.*" Dari pendapat Getzels tersebut, maka peran yang bersifat kebenaran normatif dan menetapkan batasan-batasan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seseorang secara khusus di dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu, setiap kita bicara tentang peran seseorang dalam suatu organisasi termasuk juga organisasi sekolah/madrasah tentunya, selalu berupa peranan-peranan normatif atau ideal-ideal saja.

Peran adalah aspek dinamis yang melekat pada posisi atau status seseorang di dalam suatu organisasi seperti yang dinyatakan oleh Lipham &

¹¹ E. Mulyasa, *Manajemen & Kepemimpinan*, h. 158

Hoeh (1974), "We indicate that a role is a dynamic aspect of position, office, or status in institution". Karena peran bersifat dinamis, maka ia berkembang terus sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi (termasuk di dalamnya lembaga pendidikan Islam). Peran supervisor menurut Wiles & Bondi (2007) " *The role of the supervisor is to help teachers and other education leaders understand issues and make wise decision affecting student education*. Bertitik tolak dari pendapat Wiles & Bondi tersebut, maka peran supervisor adalah membantu guru-guru dan pemimpin- pemimpin pendidikan untuk memahami isu-isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi pendidikan siswa. Untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan prestasi belajar siswa.¹² Adapun peran umum supervisor adalah sebagaimana berikut:

- a. *Observer*
- b. *Supervisor*
- c. *Evaluator* (pengevaluasi) pelaporan, dan
- d. *Successor* (penindak lanjut hasil pengawasan).

Dalam praktiknya, orang sering menyamakan antara arti pengevaluasian dengan penilaian. Padahal, arti pengevaluasian berbeda dengan penilaian. Pengevaluasian pendidikan ialah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan penilaian proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Peran sebagai penyelia melaksanakan supervisi. Peran supervisi meliputi: (1) supervisi akademik, (2) supervisi manajerial. Kedua supervisi harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan supervisi akademik, supervisor hendaknya memiliki peran khusus sebagai:

- a. Partner (mitra) guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya.
- b. Innovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya.
- c. Konsultan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah binaannya.
- d. Konselor bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah/madrasah.
- e. Motivator untuk meningkatkan kinerja guru dan semua tenaga

¹² Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, 2011), h. 78

kependidikan di sekolah/madrasah.

Dalam melaksanakan supervisi manajerial, pengawas sekolah/madrasah memiliki peranan khusus sebagai:

- a. Konseptor yaitu menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervise dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah.
- b. Programmer yaitu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah/madrasah.
- c. Komposer yaitu menyusun metode kerja dan instrument kepengawasan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas di sekolah/madrasah. 41
- d. Reporter yaitu melaporkan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah/madrasah.
- e. Builder, yaitu:
 - 1) Membina kepala sekolah/madrasah dalam pengelolaan (manajemen) dan administrasi sekolah/madrasah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah.
 - 2) Membina guru dan kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah/madrasah, yaitu:
 - Supporter yaitu mendorong guru dan kepala sekolah/madrasah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah/madrasah.
 - Observer yaitu memantau pelaksanaan standard nasional pendidikan di sekolah/madrasah.
 - User yaitu memanfaatkan hasil-hasil pemantauan untuk membantu kepala sekolah/madrasah dalam menyiapkan akreditasi sekolah/madrasah.

Uraian diatas, memaparkan tentang peran supervisi pendidikan tentu didalamnya ada supervisor (pengawas, kepala sekolah) dalam melaksanakan supervisi pendidikan di sekolah. Peran supervisi tersebut kalau dilaksanakan dengan profesional dan prosedural akan meningkatkan mutu pendidikan Islam yaitu, diantaranya menghasilkan pebelajar dengan hasil belajar yang baik. Kalau tidak dilaksanakan dengan baik, akan menghasilkan pebelajar yang biasa dan bahkan menghasilkan pebelajar yang kurang baik. Mengingat, mutu pendidikan Islam juga mengalami penurunan. Dari sinilah diperlukan peran supervisi pendidikan Islam yang profesional agar mutu pendidikan dapat diraih. Kita harus mampu menunjukkan pada masyarakat bahwa lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga pendidikan yang baik berdasarkan bukti-bukti riil,

baru kita menunjukkan kepada publik. Lembaga pendidikan Islam harus mampu menjadikan anak yang asalnya lambat menjadi anak yang pandai melalui berbagai terobosan strategis.

Dengan demikian, manajer (kepala sekolah/madrasah) harus mampu berkonsentrasi dan mensupervisi pada upaya menjadikan input yang baik melalui proses yang sangat baik untuk menghasilkan output yang unggul/istimewa: input yang sedang melalui proses yang istimewa menghasilkan output yang baik sekali; dan input yang rendah melalui proses yang sangat istimewa menghasilkan output yang baik.¹³ Lebih jelasnya dapat diperhatikan melalui tabel berikut ini:

Tabel I

Usaha Memproses Peserta Didik Menjadi Lebih Baik

42

No	Keadaan Input	Keadaan Proses	Keadaan Output
1	Baik	Sangat Baik	Unggul/Istimewa
2	Sedang	Istimewa	Baik Sekali
3	Rendah	Sangat Istimewa	Baik

Bila kepala sekolah/madrasah, pimpinan perguruan tinggi Islam, maupun kyai pesantren mampu mewujudkan perubahan pada pebelajar yaitu peserta didik/santri/mahasiswa dari baik menjadi istimewa, dari sedang menjadi baik sekali, dan dari rendah menjadi baik, maka mereka telah mampu menghadirkan pendidikan yang sejati. Mereka merupakan para “pahlawan” pendidikan. Sebab, jati diri pendidikan sesungguhnya terletak pada kemampuan mengubah kondisi peserta didik/santri/ mahasiswa menjadi lebih baik lagi. Berdasar uraian tersebut peranan supervisi pendidikan sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam, yaitu kepala sekolah/madrasah mampu memperankan supervisi pendidikan secara profesional.

c. Supervisi dalam Lembaga Pendidikan Islam

Terdapat beberapa tips dan trik yang harus dilakukan oleh supervisor atau kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan supervisi di sekolah/madrasah, yaitu:

- 1) Membangun Kesadaran; Setiap ustadz/guru dan staf sekolah/madrasah lainnya harus menyadari tugas dan fungsinya masing-masing; bahwa mereka memiliki peran penting dalam mengembangkan pribadi-pribadi peserta didik/santri. Harus disadari bahwa pengembangan pribadi peserta didik/santri ini

¹³ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, (T.t : Erlangga, 2007), h. 208

merupakan suatu proses penyiapan generasi bangsa, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, yang bisa bersaing, bersanding, bahkan bertanding dengan negara-negara lain.

- 2) Meningkatkan Pemahaman; Setelah setiap ustadz/guru memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya masing-masing, langkah berikutnya adalah meningkatkan pemahaman mereka agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dengan baik dan efektif.
- 3) Kepedulian; dalam menghadapi supervisi pendidikan adalah menumbuhkan kepedulian dikalangan ustadz/guru dan staf lainnya, sehingga mereka peduli terhadap peserta didik/ santri dan lingkungannya. Kepedulian diharapkan akan menumbuhkan sikap positif di kalangan ustadz/guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 4) Komitmen; yang harus dilakukan ustadz/guru dan staf lainnya dalam menghadapi supervisi pendidikan adalah menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam diri kita sebagai ustadz/guru, sehingga memiliki rasa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam mengemban tugas dan fungsinya. Komitmen ini merupakan janji yang tinggi bahwa seseorang akan mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dengan sungguh-sungguh dalam keadaan (situasi dan kondisi) apapun.

3. Implementasi Supervisi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah

Dalam bagian ini akan dibahas penyelenggaraan Supervisi Pendidikan Madrasah, dalam implementasinya supervise di madrasah mengalami berbagai macam problematika diantaranya adalah Problem Kultural, Problem Regulasi, Problem Sumberdaya Manusia, Problem Sarana, Prasarana, dan Dana, dan Problem Komitmen Kementerian Agama. Hal ini menjadi kendala pelaksanaan supervisi dalam meningkatkan mutu Pendidikan di madrasah, sebagai uraiannya adalah sebagai berikut:

a. Problem Kultural

Problem kultural adalah problem yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi pendidikan agama Islam pada madrasah pada saat ini yang berhubungan dengan perilaku orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan supervisi tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan yang awal keberadaannya berbasis keagamaan, dalam perkembangannya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional dan selalu mengikuti alur kebijakan pemerintah. Sebelumnya madrasah secara mandiri merumuskan pola pengembangan pendidikannya, belakangan seiring dengan perubahan

dinamika politik di Indonesia, madrasah turut dilirik secara khusus oleh pemerintah. Pandangan sebelah mata yang sejak bertahun-tahun lamanya telah membentuk pandangan masyarakat terhadap madrasah dicoba dirubah. Namun, dampak dari upaya itu dimungkinkan ciri khas pendidikan Islam pada madrasah akan memudar dan bagi sebagian kalangan dianggap cukup mengkhawatirkan.

Dalam hubungan dengan problem kultural, terdapat banyak kasus di lapangan bahwa perekrutan guru-guru madrasah tidak didasarkan pada pertimbangan profesionalitas atau kompetensi calon guru, tapi lebih pada bersifat hubungan kekeluargaan atau kedekatan dengan pihak yayasan atau pengurus madrasah. Oleh karena itu keharusan bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip profesional menjadi terabaikan dan bahkan berubah menjadi subyektif, sehingga peningkatan kualitas pendidikan di madrasah menjadi terhambat.

Pada sisi lain, seharusnya kepala madrasah mampu menjalankan perannya secara strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala madrasah tidak hanya sebagai pemimpin pembelajaran, lebih dari itu, juga merupakan pemimpin yang secara keseluruhan mencakup fungsi-fungsi perencanaan, pembinaan karir, koordinasi dan evaluasi. Pola kepemimpinan kepala madrasah sangat menentukan terhadap kemajuan pendidikan. Kepemimpinan yang baik adalah ketika kepala madrasah mampu mengelola sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepala madrasah sebagai pemimpin pembelajaran dan pengelola sumber daya manusia, hendaknya mampu menciptakan iklim organisasi yang baik agar lembaga sekolah dapat memerankan diri secara bersama untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Itulah sebagai alternatif kepemimpinan yang disebut kepemimpinan visioner-transformatif.¹⁴

Namun disadari pula bahwa kondisi kepala madrasah di lapangan khususnya madrasah swasta cukup memprihatinkan bila ditinjau dari segi kualitas, kompetensi, dan pengalaman berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan. Penulis menemukan banyak menemukan data, bahwa pengangkatan jabatan kepala madrasah lebih dikarenakan faktor hubungan kekeluargaan dengan pihak yayasan, meskipun faktanya banyak guru-guru yang mengeluhkan terkait dengan kemampuannya. Oleh karena itu keberadaan supervisi pendidikan yang dilakukan oleh pengawas madrasah menjadi penting dalam upaya menyelesaikan persoalan tersebut, dan sebagai

¹⁴Rasmianto, "Kepemimpinan Kepala Sekolah Berwawasan Visioner-Transformatif", h. 22.

konsekuensinya supervisor harus mampu menembus problem-problem budaya tersebut dengan segala kearifan dan kebijaksananya.

Problem budaya ini juga dirasakan terjadi pada sistem pendidikan di madrasah yang berorientasi pada anggapan bahwa keberhasilan pendidikan di madrasah hanya diukur dengan seberapa besar prosentase peserta didik yang lulus Ujian Akhir Nasional (UAN), tidak pada substansi pembentukan kepribadian dan akhkaq peserta didik. Juga budaya bekerja 'seadanya' dalam proses penyelenggaraan pendidikan pada madrasah masih banyak dijumpai terutama sebagai akibat dari berbagai keterbatasan, sehingga tugas supervisor adalah merubah dan meluruskan pandangan-pandangan tersebut ke arah yang lebih profesional sehingga tujuan pendidikan di madrasah dapat dicapai.⁴⁵

Lebih tidak patut lagi ketika problem ini terjadi pada beberapa supervisor yang bekerja hanya untuk mencukupi asas formalitas saja, terutama supervisor yang perektutannya tidak memenuhi kriteria persyaratan. Kondisi ini perlu dilakukan perubahan oleh pemangku kebijakan dalam hal ini adalah atasan supervisor yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten untuk mencegah terjadinya kinerja pengawas yang kurang produktif, karena pada dasarnya tujuan supervisi adalah untuk melakukan pembinaan yang terencana guna membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif,⁴⁵ dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh supervisor yang handal dan profesional.

b. Problem regulasi

Problem regulasi adalah problem yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi pendidikan agama Islam di madrasah, berkenaan dengan regulasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan supervisi tersebut. Problem regulasi di atas, adalah problem pelaksanaan supervisi pendidikan agama Islam pada madrasah, berupa kesenjangan diantara aturan dan realita yang terjadi, ketimpangan dalam pelaksanaan, atau kekosongan regulasi.

c. Problem Sumber Daya Manusia

Problem sumber daya manusia adalah problem yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi pendidikan agama Islam di madrasah pada era otonomi daerah di Kabupaten Tuban, berkenaan sumber daya manusia berkenaan dengan pelaksanaan supervisi pendidikan agama Islam pada madrasah.

Masalah sumber daya manusia menjadi tumpuan bagi lembaga madrasah untuk tetap dapat bertahan di era persaingan seperti sekarang ini.

⁴⁵ Mariono, *Dasar-dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h. 17.

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di madrasah agar menjadi lebih efektif. Walaupun didukung dengan sarana prasarana serta dana yang berlebih, tetapi tanpa didukung sumber daya manusia yang handal dan profesional, maka kegiatan pembelajaran tidak akan bisa terlaksana dengan baik.

Pentingnya sumber daya manusia berakar dari meningkatnya kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan alat berharga bagi peningkatan produktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang perlu mendapat perhatian dengan segala konsekuensinya. Untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan SDM yang berkualitas menjadi semakin mendesak selaras dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah dan penuh dengan tantangan, dengan harapan output yang dihasilkan juga mempunyai kompetensi/SDM yang tinggi pula.

d. Problem Sarana Prasarana dan Dana

Problem sarana prasarana dan dana adalah problem yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi pendidikan agama Islam di madrasah pada era otonomi daerah di Kabupaten Tuban, berkenaan keterbatasan sarana dan dana yang terkait dengan pelaksanaan supervisi dimadrasah, termasuk sarana prasarana pendidikan yang tidak bisa diabaikan pengaruhnya terhadap proses penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa pendidikan adalah sebagai proses perubahan sikap dan perilaku yakni pembentukan pribadi dan terarah pada diri peserta didik, dalam usaha mendewasakan mereka melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan sebagai kegiatan pewarisan budaya, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara yang berjiwa patriotik, serta pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, menjadikan pendidikan harus mendapatkan perhatian besar. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dari sisi pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri dimana sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran.

e. Problem Komitmen Kementerian Agama

Problem komitmen Kementerian Agama adalah problem dalam pelaksanaan supervisi pendidikan agama Islam di madrasah berkenaan dengan problem komitmen Kementerian Agama sendiri terhadap terhadap pelaksanaan program supervisi pendidikan agama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.

Sebagaimana dimaklumi bahwa urgensi penanganan permasalahan pendidikan adalah terletak pada ketepatan pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam hal ini para guru menjadi pihak yang teramat penting. Ada tiga aspek utama yang menjadi sangat urgen, yaitu aspek perencanaan pembelajaran, aspek penerapan pembelajaran, dan aspek

penilaian pembelajaran. Ketiganya harus menjadi sejalan dan sama-sama penting sesuai dengan konteksnya. Sejalan dengan itu, maka segala upaya pendukung yang dilakukan kepala sekolah atau madrasah, juga harus menjadi fokus pengawasan, dan pada fungsinya sebagai seorang pengelola lembaga, Kepala sekolah atau madrasah harus juga mengembangkan kompetensinya.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, keberadaan tenaga supervisor Kementerian Agama ditengarai masih banyak yang kurang menguasai materi dan hal metode saat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap guru-guru mata pelajaran umum di madrasah, karena sebagian besar kemampuan dasar mereka adalah pada bidang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, sehingga bila ditinjau dari PMA Nomor 2 Tahun 2012 pasal 5, kinerja pengawas masih jauh dibawah harapan pemerintah. Seharusnya pihak Kementerian Agama bekerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan untuk membuat MoU yang kontennya bahwa pengawas dari Kementerian Agama melakukan tugas pengawasan terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, sedang pengawas Kemendiknas melakukan tugas pengawasan terhadap mata pelajaran umum di lembaga madrasah.

Penilaian kinerja pengawas juga sudah diatur dalam PMA Nomor 2 Tahun 2012 pasal 19 bahwa: "Penilaian kinerja pengawas madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam ada sekolah dilakukan setahun sekali oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota". Dalam hal ini yang bertugas sebagai pemantau kinerja pengawas adalah Kasipenma, namun sejauh ini laporan bulanan hanya sekedar *down up* yang artinya hasil laporan tersebut tidak dibahas secara komprehensif sehingga bisa menghasilkan semacam umpan balik atau *feedback* dari Kasipenma selaku pemantau kinerja pengawas terhadap kinerja pengawas sekolah atau madrasah. Kondisi ini juga diperparah tidak adanya rekomendasi atau evaluasi tertulis dari Kasi Penma yang ditujukan kepada pengawas sekolah atau madrasah bahkan pengarahan terkait kinerja pengawas, bahkan secara lisanpun juga tidak atau belum ada.

Masalah tersebut, menurut hemat penulis adalah problematika yang serius untuk diselesaikan, dimana dengan adanya umpan balik terhadap hasil laporan pengawas sekolah atau madrasah diharapkan akan berdampak pada peningkatan profesionalitas pengawas dan juga sebagai bahan acuan dari pengawas untuk melakukan perbaikan kinerja baik dari segi perencanaan, pengawasan sampai tahap evaluasi. Intinya, tanpa adanya penilaian kerja yang ketat, *reward* maupun *panichment* dari pihak Kemenag akan berdampak pada stagnasi, yang bahkan berdampak pada penurunan kinerja pengawas.

Kesimpulan

Permasalahan mutu di lembaga pendidikan Islam merupakan permasalahan yang paling serius dan paling kompleks. Rata-rata, lembaga

pendidikan Islam belum ada yang berhasil merealisasikan mutu pendidikannya. Padahal mutu pendidikan itu menjadi cita-cita bersama seluruh pemikir dan praktisi pendidikan Islam, bahkan telah diupayakan melalui berbagai cara, supervisi, metode, pendekatan, strategi, dan kebijakan.

Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam masalah mutu harus menjadi perhatian utama semua pihak, agar lembaga pendidikan Islam dapat eksis dan solid serta hidup berkelanjutan dalam era global. Tuntutan terhadap mutu oleh para pengelola lembaga pendidikan Islam (kyai, kepala sekolah/madrasah, ustadz, guru, karyawan) dan pengguna (orang tua, masyarakat) merupakan suatu semangat yang besar dan kebanggaan. Masalah mutu dalam lembaga pendidikan Islam merupakan kebutuhan yang harus disampaikan dan dirasakan oleh para santri, siswa, guru, ustadz, orang tua, masyarakat, dan *para stakeholders*.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam peran supervisi pendidikan tidak boleh diabaikan. Sebab supervisi merupakan hal yang signifikan dalam mewujudkan mutu tersebut. Supervisor (pengawas, kepala sekolah/madrasah) harus mempunyai kepiawaian dan keseriusan dalam mensupervisi lembaga pendidikan Islam dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Islam. Diantaranya supervisor menerapkan prinsip-prinsip supervisi, memperankan supervisi, dan menggunakan trik dan tips supervisi pendidikan secara profesional. Disamping itu, kyai, kepala sekolah/madrasah, ustadz/guru, karyawan sekolah/madrasah berusaha keras mewujudkan perubahan pada pebelajar yaitu peserta didik/santri/mahasiswa dari baik menjadi istimewa, dari sedang menjadi baik sekali, dan dari rendah menjadi baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi., *Dasar-Dasar Supervisi*, Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2004 Asiaweek, *Political and Economic Risk Consultancy* (Online). Tersedia: [www](http://www.cnn.com).
- Cnn./AsiaNow/Asiaweek, 2000 Asiaweek, *Quality in Higher Education of Indonesia* (Online), Tersedia: [www](http://www.cnn.com).
- Cnn./Asiaweek, 2000 Baharuddin, Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam Transformasi Menuju Sekolah/Madrasah Unggul*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010
- Crosby, P.B, *Quality in Free*, New York: McGraw Hill Book Inc, 1979
- Depdiknas, *Petunjuk Pengelolaan Adminstrasi Sekolah Dasar*, Jakarta: Depdiknas, 1997
- Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Buku 1). Jakarta: Depdiknas, 2001
- Deming, W.E, *Out of Crisis*, Cambridge: Massachussets Institute of Technology, 1982

- Fullan & Stiegerbauer, *The New Meaning of Educational Change*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1991
- Feigenbaum, *Total Quality Control*, New York: McGraw Hill Book Inc, 1986
- Garvin dan Davis, A, *Management Quality*, New York: The Free Press, 1994
- Gunawan, Ary H., *Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Hadis, Abdul, Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, Bandung: ALFABETA, 2010
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2005
- Juran, J.M, *Quality Planning and Analysis*, New York: McGraw Hill Book Inc, 1993
- Makawimbang, Jerry H, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: ALFABETA, 2011⁴⁹
- Mulyasa, E, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Nasution, S, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Purwanto, M. Ngalim, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Cet. Xix, Bandung: Rosdakarya, 2009
- Qomar, Mujamil, *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, Erlangga, 2007
- Sahertian, Piet A, *Konsep-Konsep dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Sallis, Edward, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, Yogyakarta: IRCiSod, 2010
- Supandi, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Departemen Agama Universitas Terbuka, 1996
- Supriadi, Dedi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1999
- Suprihatin, MD, *Administrasi Pendidikan Fungsi dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah sebagai Administrator dan Supervisor Sekolah*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1989
- Surya, Mohamad, *Peran Organisasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Seminar Lokakarya Internasional, Semarang: IKIP PGRI, 2002
- Suryasubrata, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta: TERAS, 2009